





PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III ANGKATAN XXVI TAHUN 2019

PUSDIKLAT BADAN PUSAT STATISTIK

BIODATA

Nama

Riwayat Pekerjaan

Riwayat Pendidikan

Nomor HP

Alamat e-mail

: Daud Eliezar

: - BPS Provinsi Kalimantan Tengah (1996 – 2001)

Pusdiklat BPS (2002 – sekarang)

: - Akademi Ilmu Statistik (1996)

- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (2000)

 Institut Teknologi Sepuluh November (2010)

: 081213748545

: desinaga@bps.go.id





Tujuan Pembelajaran

Deskripsi Singkat

Mata diklat ini memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi pada peserta diklat prajabatan, disajikan berbasiskan Experiential learning; dengan penekanan pada proses internalisasi nilai-nilai dasar tersebut, melalui multi metode dan media ceramah interaktif, diskusi menonton film, studi kasus simulasi dan demontrasi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam memimpin, mengelola jabatannya.

Change Rolicy

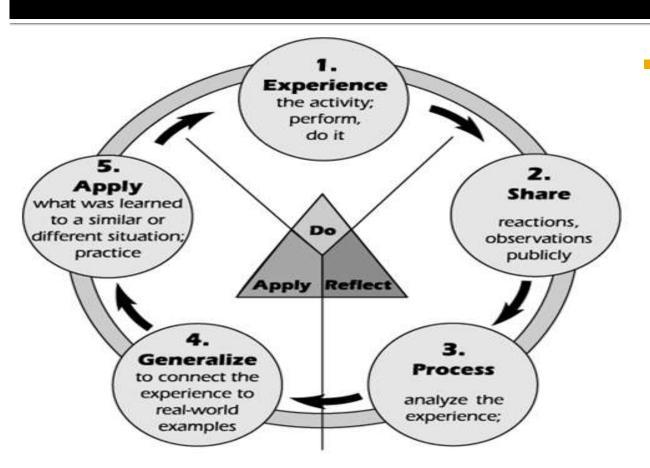
(Kebijakan

Rembaharuan)

Diklat

Prajabatan

Metode EXPERIENTIAL LEARNING



 Metode yang digunakan adalah experiential learning model, seperti konsep model Kolb (1984) dan Kurt Lewin, yang memiliki konsep model deskriptif untuk proses pembelajaran orang dewasa.



A. Sadar Anti Korupsi

- Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi
- Pengertian Korupsi
- Tindak pidana Korupsi
- Niat, Semangat, Komitmen Anti Korupsi
- Indonesia Bebas Korupsi

B. Semakin Jauh Dari Korupsi

- Tunas Integritas
- Identifikasi Nilai Dasar Anti Korupsi
- Penyelarasan Nilai Organisasi dan Anti Korupsi
- Penanaman Nilai Integritas
- Bangun Sistem Integritas





ciptaan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan

yang luar biasa







Gas alam kualitas terbaik









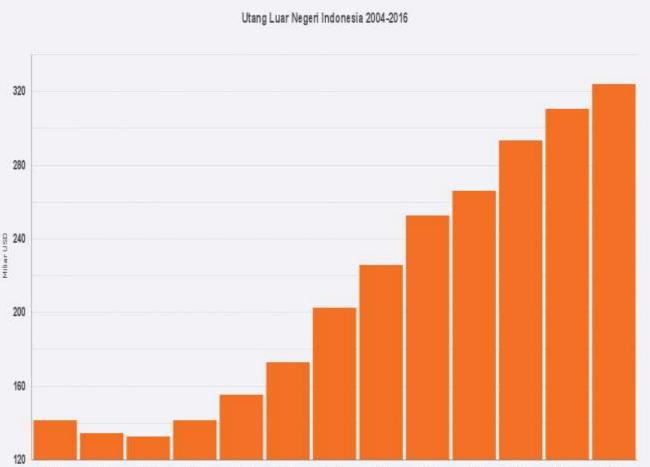


Batu Bara Terbaik



Tanah yang Subur

Utang Indonesia



2009

2010

2011





Utang Pemerintah RI Rp 3.021 triliun

Dalam 10 bulan, atau Januari Oktober 2015, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat naik Rp 412,52 triliun, menjadi Rp 3.021,3 triliun. Berikut ini data dan perbandingan utang pemerintah dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jumat (20/11/2015).





2004



2016

Berita Utang Indonesia

Rabu 21 Sep 2016, 06:55 WIB

Utang Pemerintah RI Rp 3.438 T, Naik Rp 78 T Dalam Sebulan

Wahyu Daniel - detikFinance



Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir Agustus 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.438,29 triliun. Naik Rp 78,47 triliun dibandingkan akhir Juli 2016, yaitu Rp 3.359,82 triliun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir Agustus 2016 adalah US\$ 258,52 miliar, naik dari posisi akhir Juli 2016 yang sebesar US\$ 256 59 miliar

Berita Utang Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Posisi utang pemerintah pusat Indonesia tercatat senilai Rp 3.706,52 triliun sampai dengan Juni 2017. Realisasi tersebut melonjak Rp 34,19 triliun dibanding posisi utang hingga akhir Mei lalu yang sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/7/2017), utang pemerintah pusat sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.979,50 triliun (80,4 persen) dan pinjaman sebesar Rp 727,02 triliun (19,6 persen). Pembiayaan yang berasal dari utang ini digunakan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp 3.672,33 triliun, utang pemerintah pusat di Juni 2017 secara neto meningkat sebesar Rp 34,19 triliun. Berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 35,77 triliun dan pelunasan pinjaman neto sebesar Rp 1,59 triliun.

DJPPR menyebut telah terjadi penambahan utang neto sebesar Rp 191,06 triliun di semester I-2017 yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman mencapai sebesar Rp 7,83 triliun.

BACA JUGA

Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Utang Ri Layak Investasi

Buat Danai Infrastruktur, Utang Ri Belum Bisa Kurangi Kemiskinan

Menko Luhut: Posisi Utang

Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia



Daerah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi Maret 2013

Papua	31,13%
Papua Barat	26,67%
 Maluku 	20,33%
 Nusa Tenggara Timur 	20,03%
Bengkulu	18,34%
 Nusa Tenggara Barat 	17,97%
Aceh	17,6%
Gorontalo	17,51%
	Sumber: BPS/Gho

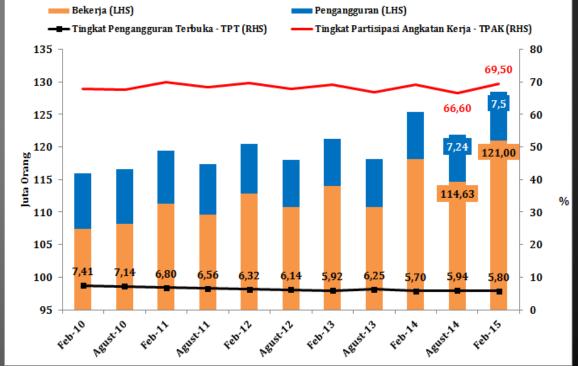












Sudah makmurkah rakyat Indonesia?





Kajian Dampak Perilaku Korupsi

Kajian

1.	Negara Korup harus membayar biaya hutang yang lebih
	besar (Depken and Lafountan, 2006)

- 2. Harga Infrastruktur lebih tinggi (Golden and Picci, 2005)
- 3. Tingkat Korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta, Davoodi and Alonso-Terme, 2002)
- 4. Korupsi menurunkan investasi (Paolo Mauro, 1995)
- 5. Persepsi Korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing (Shang, ADB)
- 6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi (Campos dan Pradhan, ADB)

Kerusakan hutan dan lingkungannya

Bangunan yang cepat rusak

Penegakkan Hukum yang tidak adil

Pelayanan Publik yang buruk

Peredaran Narkoba

Sumber Daya Alam melimpah Rakyat tetap sengsara, dll. Fenomena yang terjadi



TOP COUNTRIES

DENMARK

FREAND

SINGAPORE

SWEDEN

● NEW ZEALAND

SWITZERLAND

MORTH KOREA

SOUTH SUDAN

W BOTTOM COUNTRIES

HOME

WHO WE ARE *

W





GUIDAL AVERAGE

 EN ZEALAND

MANAGORIA

VETPALIA

VET

https://www.transparency.org/hexis/festure/asia_paolis_makes_little_ts_-

31
COUNTRIES ASSESSED

*** @ & Q Com

(2)

44/100

AVERAGE CPI REGIONAL SCORE

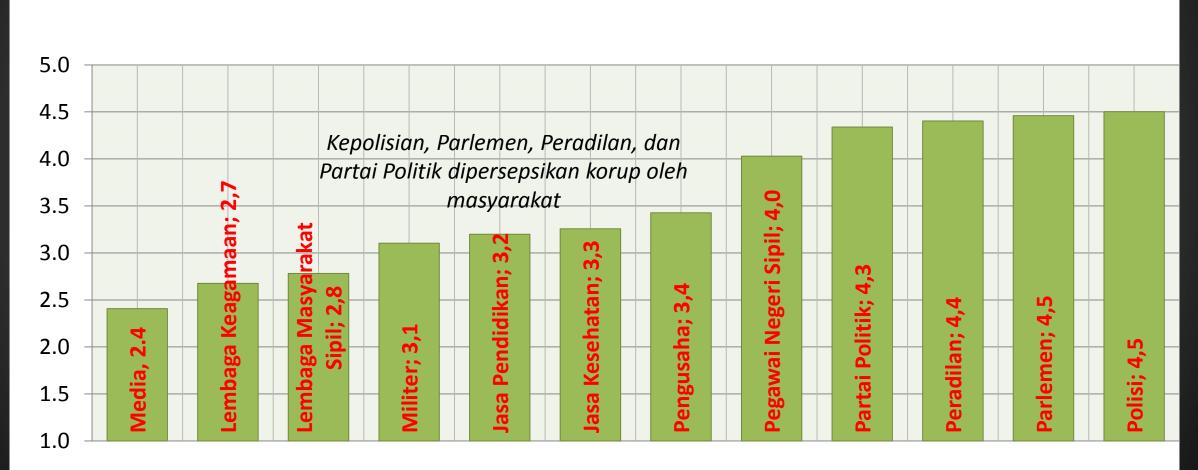
CPI points colour code: The DPI come a some form D to 100. 100 to very other and D to tigging consult.



SURVEYS • 29 JANUARY 2019

ASIA PACIFIC: LITTLE TO NO PROGRESS ON ANTI-CORRUPTION

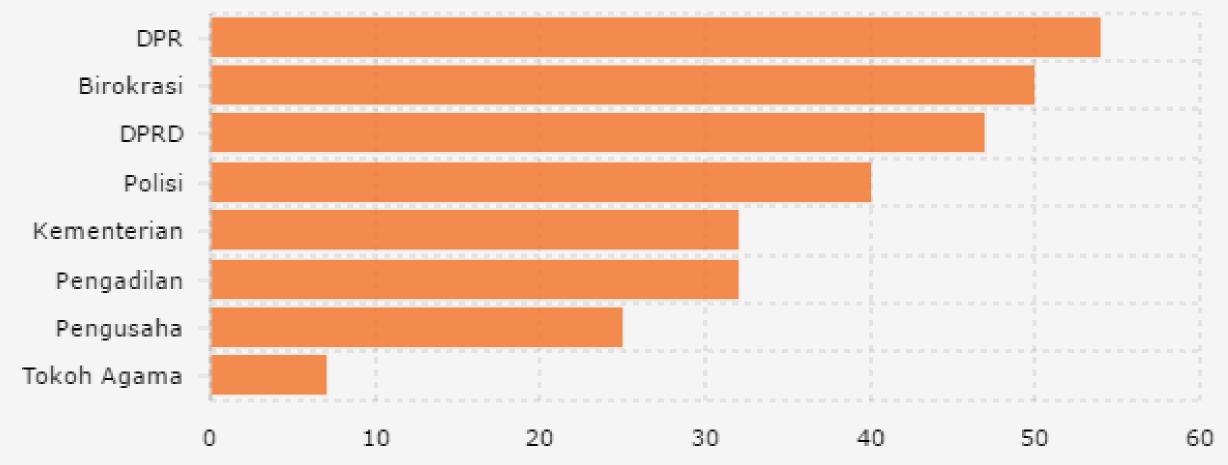
Problem korupsi Indonesia: korupsi birokrasi dan politik



Skala 1-5, dimana berarti tidak korup sama sekali, sedangkan 5 berarti sangat korup

Sumber: Global Corruption Barometer (2013)

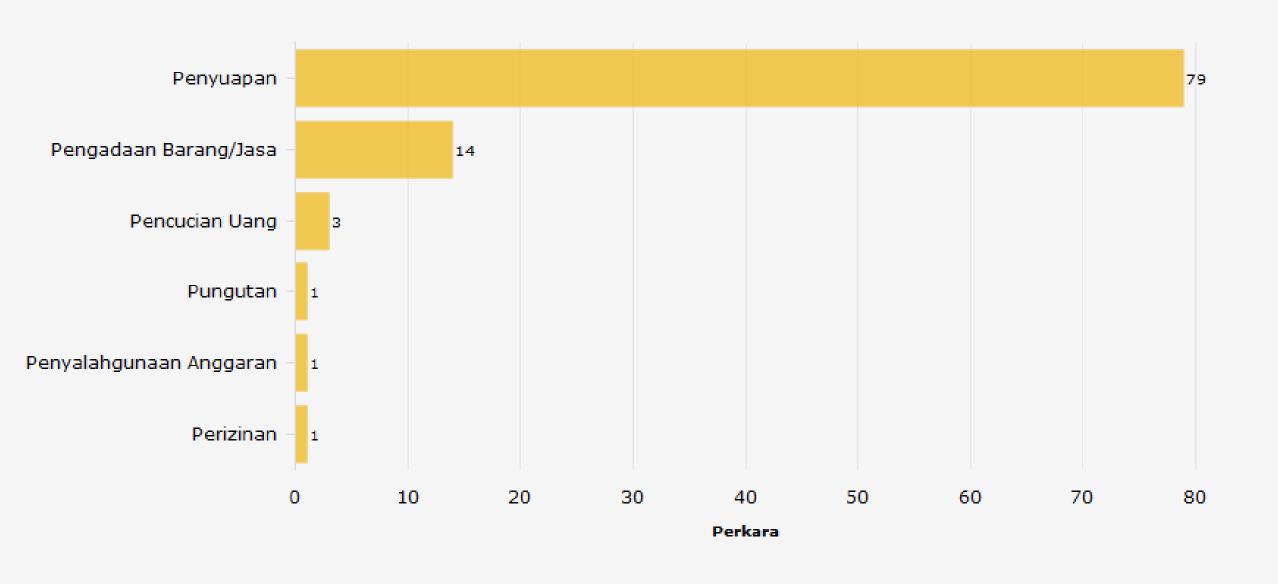
Survei Persepsi Lembaga Paling Korup oleh Tranparency International pada 2017







Jumlah Perkara Korupsi yang Ditangani KPK pada 2016 Berdasarkan Modus



INDEKS PERILAKU Anti Korupsi 2015 Menurun

ntuk kali keempat, BPS merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi 2015 di Gedung 3 lantai 1 BPS (22/2). Dalam survei yang melibatkan sampel 10.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 170 kabupaten/kota di Indonesia pada November 2015 ini menghasilkan indeks sebesar 3,59 atau lebih rendah 0,02 poin dibandingkan dengan IPAK 2014 sebesar 3,61. "Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sebaliknya nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi," jelas Suryamin, Kepala BPS:

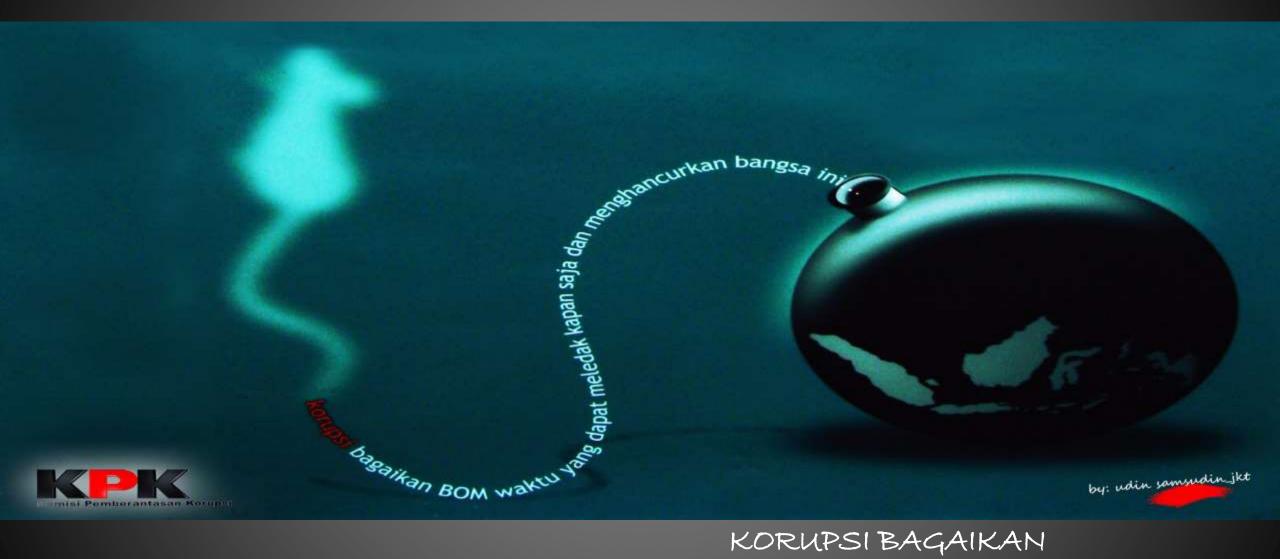
Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial, M.Sairi; Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan; Direktur Analisa Perundang-undangan Bappenas, Diani Sadiawati; dan *Country Manager* United Nation Office on Drugs and Crime, Collie Brown. Sementara Ketua KPK, Agus Rahardjo yang awalnya dijadwalkan hadir, batal datang karena adanya pembahasaan amandemen UU KPK di hari yang sama.

Lebih lanjut, Suryamin mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap dua dimensi ini Pahala menanggapi, "KPK tidak terlalu mempersalahkan terjadinya penurunan dalam IPAK 2015. Justru survei ini sangat



bermanfaat karena dilakukan secara kuantitatif dan berdasarkan fakta di lapangan. Dari dimensi persepsi saya pikir teman-teman media sudah cukup berhasil menginfokan ke masyarakat dalam membentuk pengetahuan anti korupsi. Akan tetapi tidak demikian faktanya di lapangan. Masih banyak praktik korupsi ditemui di pelayanan publik. Oleh karenanya survei ini sangat membantu KPK untuk mendukung diwujudkannya pelayanan terpadu satu pintu," tutur Pahala di akhir konferensi pers.

■ V2



KORUPSI BAGAIKAN BOM WAKTU



COMBATING CORRUPTION







THE MISSION CONTINUES













· DASAR HUXUM

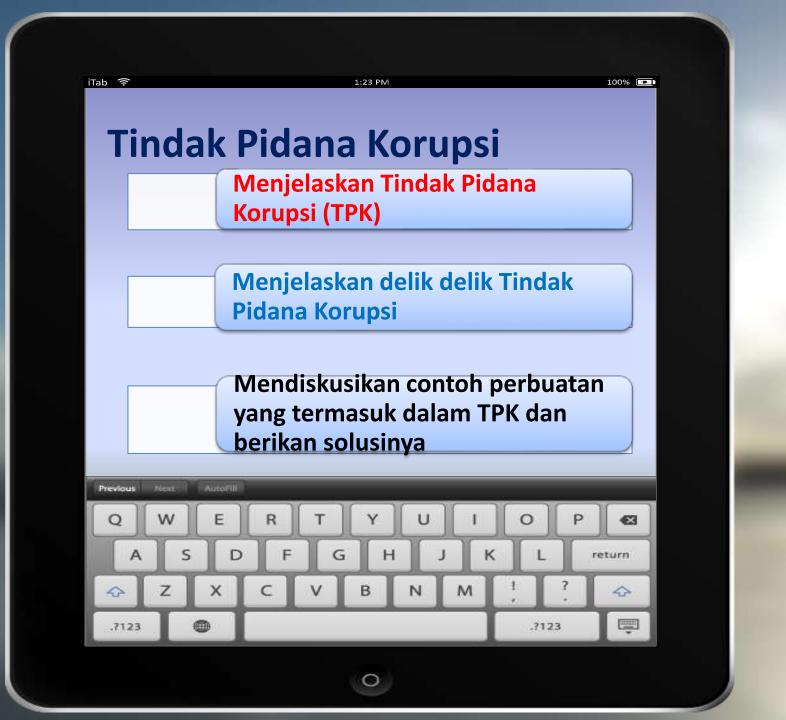


- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006
 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against
 Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30
 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DASAR HUXUM Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999



- Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999** Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;





Dagang Pengaruh Mesti Dijadikan Delik Hukum

RAMIS, 22 SEPTEMBER 2010 / NO. 12505 / YAHUN RE-17

DENGAN adanya pola tindak pidana korupsi baru, yakni mendagangkan pengaruh yang diduga melibatkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, sejumlah

pihak mendesak adanya perubahan perangkat regulasi anti-korupsi. Dagang pengaruh mesti

dimasukkan sebagai delik hukum.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Giming, kemarin, Menusutnya, hingga saal ini hukum positif Indonesia belum mengakomodasi ketentuan mengenai mendagangkan pengaruh. Namun, ketentuan mendagangkan pengaruh sudah terdapat dalam Pasal 18 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Miko lebih lanjut mengatakan, meskipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No 7 Tahun 2006, masih disyaratkan untuk dibentuk ketentuan khusus guna mengimplementasikan delik mendagangkan pengaruh. Dasar jalannya proses peradilan pidana bagi seseorang ialah hanya apa yang sudah tertera dalam undang-undang.

"Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif. Agar kasus dengan pola serupa di kemudian hari dapat dijerat dengan delik mendagangkan pengaruh," tukasnya.

Namun, meski hal itu belum diatur dalam UU, Miko mendesak KPK mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam perkara suap kuota gula impor yang menyeret Irman Gusman, komisaris MNC Group, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Tuntas dalam arti KPK harus mampu membongkar semua aktor, pola, dan jaringan dalam kasus ini," tukasnya.

KPK membidik oknum Bulog pada perkara

"Pemerintah dan DPR seharusnya segera membahas ketentuan mendagangkan pengaruh untuk diakomodasi dalam hukum positif."

Miko Ginting

Peneliti Pusat Studi Hukum dan ketujakan Indonesia

dugaan suap yang melibatkan Irman. "Ini bergantung pada hasil dari pengembangan. Kalau ada buktinya yang mengarah ke sana (keterlibatan oknum Bulog) kita pasti akan melakukan penyelidikan dan penyidikan," terang Wakil Ketua KPK. Laode M Syarif, di Gedung DPR, kemarin.

Syarif hanya mengatakan bahwa KPK sudah mendapatkan informasi bahwa Irman sempat menghubungi Kepala Bulog Djarot Kusumayakti terkait kuota gula impor. "Salah satunya ada rekomendasi."

Menurutnya. KPK akan mengembangkan perkara ini dengan dasar bukti yang nantinya didapat dalam proses penyidikan perkara yang telah menjerat Irman. Itu termasuk mendalami pemberian lain Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya, Memi, kepada Irman senilai Rp100 juta. "Itu juga sedang kami dalami," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa pihaknya tidak menargetkan Irman dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya di Jakarta (17/9). "Selalu dari awal laporannya dari masyarakat. Itu juga tidak ditelan begitu saja, selalu kita analisis." terangnya di Gedung DPR. (Cah/X-5)



KLIPING

SHARP WAS IN ANY AND PARTY OF THE PARTY OF T

2 JULI 2016





LARANGAN GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan hari raya, KPK mengajak seluruh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami sebagai berikut:

- KPK mengscapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh komponen barigsa untuk bersamasama menciptukan Indonesia yang lebih baik dan bebes dan korupsi, terutama dan dunia osaha dan masyarakat untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara;
- 2. Bahwa terjadi kecanderongan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran menjelang perajuan hari 1999 yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi dan rekananbengusaha masyarakat yang umamnya berkaitan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab Pejabat Public, Pegawai Negeri dan Penyelenggura Negara sebaga pihak yang potensial menerima gratifikasi.
- 3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan kasil pemantatuan kami di lapungan, tardapat sejumlah permintaan dana danjatau hadiah setuk Tunjangan Heri Raya (THR) atay sebutan lain oleh sejumlah pejahat publik, Pegawa Negori dan Penyalenggara Negara kepada masyarakat danjatau pemalahaan, bali secara Isan ataupun tertuis, Halim peda pirasipnya dilarang karana merupakan penyalahgurain wewenang yang menjutas ike arah Tindak Pidara Korupu (TPK), dapat menimbulkan berturan kepentingan dan menurunkan kepentayaan masyaraka.
- 4. Terkait dengan kediasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan kennya, perdecian granfiksar kepada Pegawa Negari/Penyekenggara Negari beserta keluarganya baik berapa uang bingkisan/pansel, fasilitas ataupan pemberian lainnya wang berbubungan dengan jabutan dan berfawanan dengan kewajihan atau tugasnya, pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam lini wajib ditolak. Namun apabila diterma secara tidak langsung atau tolak disetanui peratwa pemberiannya, wajib dilaponian kepada KPK paking lambat dalam waitu ya tiga puluhi han kerja setelah diterima atau melajui Unit Pengendal Gratifikas (UPS) di metinal mesing matang paling lambat 7 (tujuh) bari kerja setelah diterima:

5. Kepada setiap pimpinan instansi atau fembaga pemerintah agar melarang penggunaan fesilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas siati pegawai untuk laiper tingan pribad seperti untuk kegiatan mudik, mengingat fasilitas dinas seharusnya hansa digunakan untuk kepentingan terkalt kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menuntuhan kepertayaan mesyarakat kepada Pejabat Publik Pegawai Negari san Pemakenggara Negare.

- 6. Kepada Satuan Pengawas Internal atau UPG pada arties interna Personitah, b.UML dan BUMD diharapkan melakukan pemantauan, pendatuan dan mengkapadicaskan pelapuan penerimaan gratifikasi maupun pengajunsan kendaraan finas deh prabat dan pegawai 6 langkungan kerjanya. Sesanjunya penerimaan gratifikasi tersebut sepera disampaikan an CPK selambat-lambatnya ya (tiga puluh) hari kerja;
- 7. Kepada Asonani Gabungan J-Impunan Perutahan Swatta agar sapar menancian ambauar ini kepada seloruh anggota di Ingkungan mesing-masing umuk tidak memberi sesuata dalam bertuk apapun terkait Perangan Hari Rana kapada Pegawa Negan dan Pempelenggara Negan sung berhubungan dengan jabatan dan bertukanan tengan sewejiban atau tuganna Apabila dalam kondisi tertento terpaksa memberikan sung, grandikasi atau uang palicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesampatan partama.

untuk informasi letan tenjat dasat dawas di wawapa.ga.idigratifikasi etau enali le pelaporan.gratifikasi@kpk.ga.id atau dengan meripenas well pelaporan gantifikasi prilim di https://gol.kpk.ga.id.atau.merighatungi.tur.idepun aligo-lifi-colint.vac.upplicas.tup-otypicas

Pumpinan KPK beserta ayaran mengucapkan selamat fan teus, semoga Alao Daff menerina basal kita dan senantiara memberikan berkan, minmat, dan perlimbingan di bas yang situ in

Mohon maaf lahir dan batin.







Pengertian Korupsi

Korupsi adalah diskresi dan monopoli tanpa adanya akuntabilitas

K = D + M - A

orupsi

 \mathcal{D} iskresi

 ${\mathcal M}$ onopoli

Akuntabilitas

Diskresi (KBBI) = kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi

Monopoli (KBBI) = hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya)

Akuntabilitas (wikipedia) = pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan

China "Tanwu"

Latin Corruptio

> Jepang "Oshuko"

Muangthai "Gin Moung"

Lingkaran dengan kode yang menunjukan arti dari berbagai istilah korupsi:

- a. Kerusakan atau kebobrokan
- b. Makan Bangsa
- c. Kerja Kotor
- d. Keserakahan Bernoda

10 DIMENSI KORUPSI (UN)

(Dalam: Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)



Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, UN.



Peta Korupsi

- Penyelewengan dari target → Audit Perencanaan
- Pemerasan kepada wajib pajak
- → Transparansi & akuntabilitas sistem pajak
- Manipulasi data → Perbaikan sistem
- 4. Terjadi COI --Inisiasi UU COI
- Masuk pada APBD: Penyalahgunaan wewenang, penggelapan Pelaporan tidak standar Alokasi

penggunaan tidak

→ Perbaikan sistem

transparan

- Penyalahgunaan perizinan
 - → Perbaikan sistem kewenangan
- Tidak ada single data base
 - → Integrated database

Peneri-

maan

Pajak

DAU/ DAK/

Dekonsen-

trasi

penertiban Perda

- Penyelewenangan penyetoran
 - → Perbaikan sistem penerimaan

Penerimaan non Pajak

Peta Korupsi

Pungutan daerah

Belanja Barang dan Jasa

Bantuan Sosial

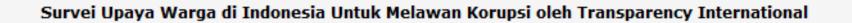
1. Penyimpangan prosedur pengadaan → Mendorong eproc, pembentukan ULP, penetapan HPS,

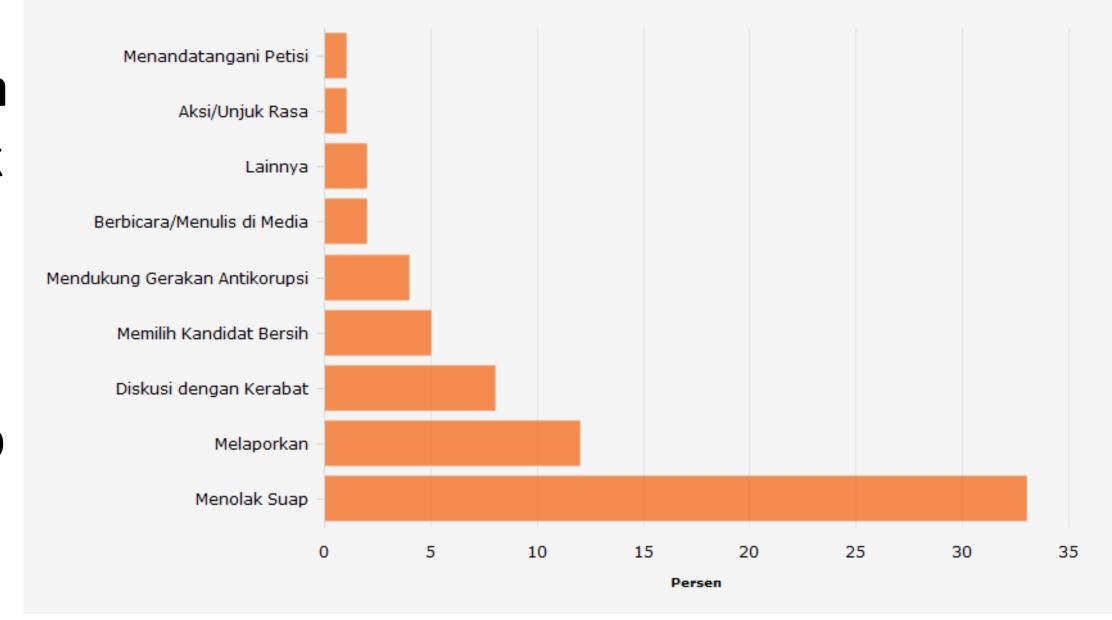
pengaturan COI, Whistleblower system, transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan.

Penghasilan aparat – penindakan

PERDA tak mengacu pada perUU --

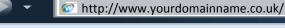
- Penyimpangan peruntukan
- Penggelapan
- Fiktif
- → Perbaikan sistem penganggaran, Penguatan pengawasan DPR





NEXT CHAPTER MODUL 2

△ △ △ △







Peran Junas Integritas

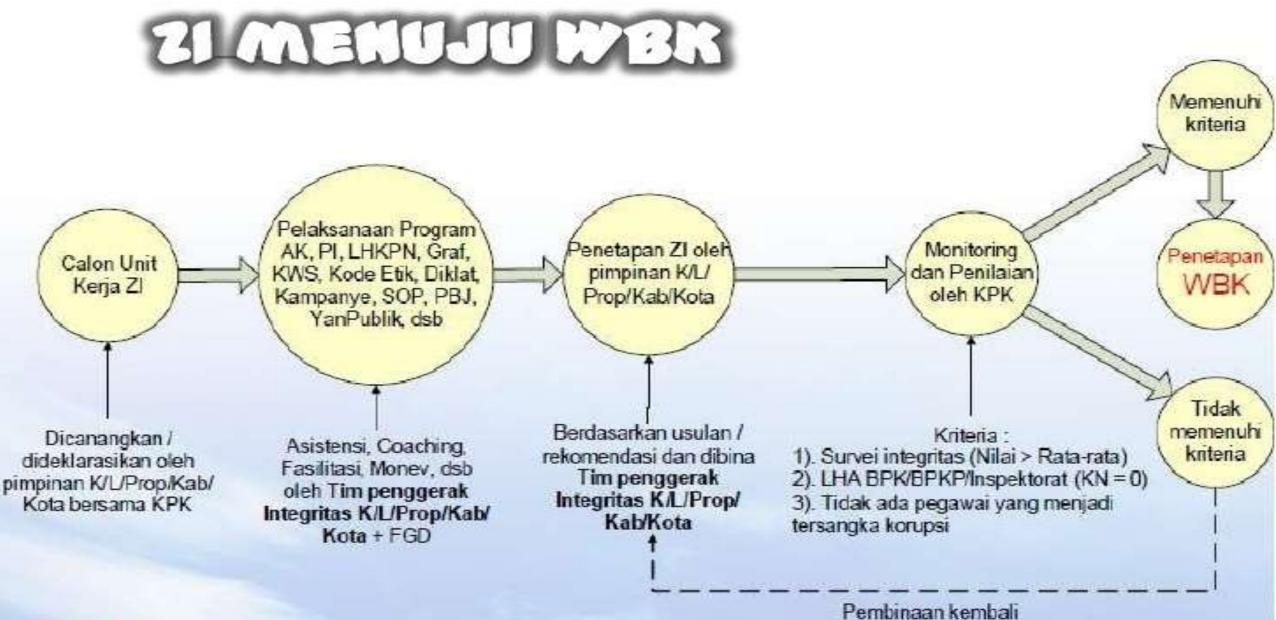
Tunas Integritas diharapkan dapat menjalankan peran strategis dalam organisasi berupa:



- 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.
- 2. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya tidak terjadi.
- 3. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi

C. SISTEM INTEGRITAS ORGANISASI







(Dalam: Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan Integritas Aparatur, ppt)



Junas Integritas



